

## PEMBERDAYAAN, MERETAS KEMISKINAN NELAYAN

Berdaya harus senantiasa menjadi bagian kehidupan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari hak hidupnya. Memberdayakan menjadi kewajiban bagi setiap pihak yang mengambil bagian untuk mengurus kehidupan pihak lain. Hanya jika manusia berdaya, maka mereka bisa hidup dinamis, karena dengan daya yang diberi ruang maka gerak maju bisa tercipta. Sehingga pemberdayaan bisa berarti pemberian ruang untuk manusia bisa hidup layak dari waktu ke waktu. (*Agussalim, S.Pi*)

### A. Dasar Pemikiran

Pemberdayaan pernah menjadi hal yang terlupakan untuk waktu yang lama. Hal tersebut berefek pada kurang terpenuhinya hak hidup orang-orang yang seharusnya diberdayakan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang pemberdayaan dan orang-orang yang membutuhkan pemberdayaan cenderung merupakan orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya butuh diberdayakan.

Hal itu terjadi pada hampir setiap lapisan masyarakat di Negara kita. Sehingga yang terjadi adalah kelambanan dalam proses pembangunan baik fisik maupun mental spiritual bangsa. Masyarakat yang didominasi oleh mayoritas masyarakat agraris dan masyarakat bahari, dalam waktu yang sangat lama mengalami krisis dalam upaya pemberdayaan oleh pemerintah, selaku pemegang kekuasaan. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana kesadaran untuk memberdayakan masyarakat menjadi sebuah spirit bersama yang bisa dimiliki oleh siapapun yang berada pada kondisi yang mampu untuk memberdayakan pihak lain yang lebih lemah. Sehingga gerakan pemberdayaan masyarakat menjadi gerakan besar yang bisa membawa bangsa kita pada momentum pertumbuhan yang semakin lama semakin cepat.

Dewasa ini kata pemberdayaan kemudian menjadi familiar, ketika ramai disebutkan bahwa kunci kemajuan masyarakat adalah dengan memberdayakannya. Pada masyarakat bahari (pesisir dan pulau-pulau) upaya pemberdayaan juga mulai banyak digalakkan dengan berbagai jenis kegiatan yang memberdayakan. Mereka disupport mulai dari aspek kognitif, psikologis maupun ekonomi dan politik. Tulisan ini dimaksudkan membagikan informasi tentang pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap masyarakat nelayan dalam rangka membangun SDM mereka agar lebih berdaya saing di masa sekarang dan di masa mendatang.

## B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Nelayan

Salah satu tugas besar yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa kesejahteraan bukan untuk pribadi tertentu atau golongan masyarakat tertentu semata, tetapi hak seluruh masyarakat. Dan bahwa kecerdasan bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita yang berada pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang notabene menggantungkan hidup dengan berprofesi sebagai nelayan?

Hal inilah kiranya yang mendasari sehingga Negara kita kemudian membangun sebuah departemen yang khusus mengurus nelayan, agar terpenuhi kebutuhannya baik secara sosial ekonomi maupun kebutuhan terhadap kecerdasan (*knowledge and skill*). Fakta yang tidak asing bagi kita bahwa keterbelakangan ekonomi (miskin) dan keterbelakangan pendidikan merupakan warna dominan pada masyarakat nelayan kita.

Kemiskinan pada nelayan tidak berdiri sendiri. Kemiskinan nelayan adalah kemiskinan kultural dan juga kemiskinan struktural. Mereka miskin karena mereka memang miskin secara budaya (sumberdaya, mindset, mental dan semua aspek internal mereka) dan mereka miskin karena faktor eksternal (kebijakan, intervensi pasar dan semua aspek di luar kendali nelayan).

### 1. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dengan kemiskinan seperti sepasang sebab dan akibat. Yang satu bisa menjadi sebab bagi yang lain. Demikianlah yang dialami masyarakat nelayan. Mereka terbelakang pendidikan sehingga sulit meretas kemiskinannya, dan karena mereka miskin sehingga sulit beranjak dari keterbelakangan pendidikan.

Lemahnya pendidikan menjadi sumber utama kebuntuan jalan bagi nelayan. Dari sisi ekonomi mereka tidak mampu mengatur pengelolaan keuangan dengan baik. Dari sisi keterampilan mereka terbatas pada penggunaan teknologi alat tangkap atau budidaya yang sederhana, sehingga akses mereka hanya pada jarak yang dekat yang tentu signifikan dengan hasil yang juga tidak terlalu banyak. Pada sisi lain, keterbelakangan penguasaan teknologi penangkapan menggiring mereka untuk menggunakan alat-alat atau cara yang sesungguhnya merusak sumberdaya yang mereka kelola, misalnya

dengan pengeboman, potassium, sianida ataupun tuba, juga metode penangkapan dengan berburu (merusak karang).

## 2. Kepemilikan Sumber Pendapatan yang Bersifat *Common Property*

Laut sebagai tempat mencari ikan bagi nelayan merupakan tempat pencarian yang bersifat milik umum (*common property*) yang dibarengi dengan rezim pengelolaan yang bersifat akses terbuka (*open access*). Kondisi ini membuat nelayan tradisional umumnya tidak mampu bersaing mendapatkan hasil yang sama dengan nelayan lain yang memiliki armada tangkap yang lebih besar.

Di laut nelayan bersaing dengan nelayan yang lebih kuat daya tangkapnya, di darat nelayan harus berurusan dengan retribusi yang kadang kurang berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil. Sehingga tidak heran jika nelayan kadang tidak mau mendaratkan kapalnya pada PPI yang sudah disiapkan pemerintah, karena menghindari impas pengeluaran dan pendapatannya.

Pada kondisi yang lebih buruk, di sebagian wilayah pesisir telah terjadi *destructiv fishing* dan *over fishing* sehingga hasil yang diperoleh nelayan kecil semakin sedikit. Untuk memperoleh hasil yang lebih banyak mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh yang berefek pada BBM dan biaya yang lebih besar. Maka semua hal-hal ini kemudian menjadi seperti lingkaran setan bagi nelayan yang semakin menyulitkan mereka keluar dari keterpurukan ekonominya.

## 3. Lemahnya manajemen keuangan nelayan

Salah satu faktor yang menyulitkan nelayan dalam menata keuangan adalah berfluktuasinya pendapatan mereka. Ketidakmenentuan pendapatan tersebut disebabkan oleh musim, dan ketersediaan sumberdaya ikan pada daerah penangkapan mereka. Kondisi ini diikuti oleh kecenderungan nelayan untuk melakukan utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama saat paceklik tiba. Hal ini juga mendasari munculnya sistem ijon atau punggawa-sawi (di Makassar).

Pada sebagian besar nelayan juga terdapat sifat boros dan malas menabung. Hasil laut yang kadang melimpah dan harganya tinggi menjadikan nelayan berpikir bahwa akan selalu ada hasil yang melimpah disediakan oleh laut, sehingga menghabiskan apa yang ada saat ini bukanlah suatu hal yang keliru. Mereka juga berpikir tidak perlu menabung selagi masih mampu bekerja, karena akan selalu ada hasil laut yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

#### 4. Konflik Sosial Nelayan

Kondisi yang banyak terjadi di laut saat ini adalah persaingan mendapatkan sumberdaya yang terbatas. Hal ini tentu saja lambat laun akan menimbulkan konflik. Konflik sosial nelayan umumnya disebabkan oleh konflik penggunaan alat tangkap. Ada nelayan yang menggunakan alat tangkap sederhana seperti pancing, disisi lain ada nelayan yang menggunakan pukat, hal ini menimbulkan konflik karena hasil tangkapan jauh berbeda. Selain jumlah hasil tangkapan berbeda, perbedaan alat tangkap juga menyebabkan perbedaan kelas social dan hal ini pun berpotensi konflik.

Wilayah tangkap juga cenderung menjadi penyebab konflik. Adanya klaim kepemilikan maupun klaim akses pada wilayah perairan menyebabkan pembatasan terhadap nelayan tertentu untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan kecemburuan yang berujung pada konflik. Kemajuan teknologi penangkapan ikan, serta permintaan pemenuhan kebutuhan ikan yang tinggi, menyebabkan banyaknya invasi nelayan ke wilayah-wilayah yang jauh. Konflik bisa dimulai dengan adanya penangkapan secara sembunyi-sembunyi oleh nelayan luar. Bahkan pada level yang lebih tinggi nelayan luar melakukan penangkapan secara terang-terangan dan tidak mengindahkan adanya batas-batas wilayah tangkap tersebut.

Konflik social nelayan tentu saja sangat berdampak terhadap perekonomian mereka. Adanya konflik bisa menyebabkan mereka tidak berani melakukan aktivitas penangkapan ikan di daerah tertentu yang berfek pada menurunnya pendapatan mereka. Biasanya konflik berlangsung lama dan sulit menemukan solusi. Dibutuhkan campur tangan pemerintah secara proaktif untuk pencegahan konflik atau pemulihan kondisi pasca konflik.

### **C. Bentuk Pemberdayaan untuk Meretas Kemiskinan Nelayan**

Menurut Anonim (2013), pemberdayaan ialah terjemahan dari *empowerment* yang menurut Kamus Oxford kata *empower* sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua cita rasa pemberdayaan yakni yang member manfaat kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Cita rasa kedua dikenal dengan istilah *self-empowerment* (pemberdayaan sendiri) dimana kekuasaan diperoleh oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri.

Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran. Ia juga mencakup lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi dari kedua belah pihak yang terlibat, yang didapat dari solusi menang-menang (*win-win*) menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup yang lebih sejahtera, bagi semua yang terlibat. Dengan demikian pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya untuk membantu orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin orang-orang agar belajar memimpin diri mereka sendiri. (Anonim, 2013).

Pemberdayaan dalam berbagai bentuk telah dilakukan untuk memberdayakan nelayan. Bentuk pemberdayaan itu di antaranya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melalui program pembentukan P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan) yang dibentuk dari masyarakat nelayan atau yang memiliki usaha berbasis kelautan dan perikanan. Berikut uraiannya:

### **1. Pemberdayaan Nelayan Melalui P2MKP**

P2MKP atau singkatan dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Nusantara. Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan difasilitasi untuk mandiri melalui pendampingan administrasi dan teknis serta didukung dengan biaya operasional yang kemudian disahkan menjadi P2MKP. Lembaga masyarakat ini kemudian menjadi mitra pemerintah, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk melaksanakan pelatihan seputar usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan seperti usaha budidaya, pengolahan ikan, penangkapan dan penanganan ikan, kerajinan kerang mutiara dan sebagainya. (Agussalim, 2013)

Lembaga ini kemudian menjadi perpanjangan tangan dan membantu terdistribusinya pelatihan di wilayah kerja balai diklat perikanan milik Kementerian KP di seluruh Indonesia. P2MKP terdiri atas masyarakat yang memiliki usaha perikanan yang produktif dan bersedia membagi pengetahuan seputar usahanya termasuk proses-poses produksi dan manajemen usahanya kepada masyarakat di sekitarnya. Tujuannya adalah agar masyarakat di sekitarnya mampu membangun usaha yang sama dan turut berhasil. P2MKP melakukan pelatihan berdasarkan SK (Surat Keputusan) resmi dari Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP. P2MKP melaksanakan pelatihan

dengan pendampingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) yang berada di bawah naungan Pusat Pelatihan KP, termasuk di antaranya BPPP Ambon.

Asal muasal P2MKP lahir dari adanya unit usaha yang dibangun oleh pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah, pengrajin) yang menjalankan usahanya secara swadaya. Unit-unit usaha ini sudah menghasilkan produk-produk yang diterima di pasaran. Pengelolaan usaha ini dijalankan oleh satu atau beberapa orang termasuk pemilik utama usaha. Unit usaha ini diusulkan untuk diangkat menjadi P2MKP setelah melewati verifikasi beberapa persyaratan oleh BPPP yang akan menjadi pembinanya. Persyaratan tersebut di antaranya adalah tersedianya fasilitas belajar/berlatih, tersedianya unit produksi (alat-alat produksi) tersedianya tenaga pelatih dan beberapa persyaratan lainnya. Unit usaha calon P2MKP mengisi formulir dari BPSDM-KP dan mendapat rekomendasi dari Dinas KP tempat dimana usaha ini berada.

Dari upaya pendampingan masyarakat dalam rangka melakukan pelatihan diketahui banyak hal positif dari pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan yang diprogramkan BPSDM-KP ini, di antaranya:

1. Kegiatan pelatihan P2MKP membantu distribusi pelatihan bidang kelautan dan perikanan di Nusantara. Keberadaan P2MKP sangat membantu BPPP lingkup Pusat KP untuk mendistribusi pelatihan dengan cepat karena beberapa kegiatan pelatihan bisa berlangsung serentak di beberapa P2MKP dan hanya membutuhkan satu orang pendamping dari BPPP untuk tiap kegiatan.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terkait hal yang dilatihkan (budidaya, pengolahan ikan, penangkapan dan penanganan ikan, kerajinan kerang mutiara dan sebagainya). Slogan begitu dekat begitu nyata, tepat digunakan oleh P2MKP dalam rangka membangun pengetahuan, keterampilan dan motivasi usaha para lulusan pelatihan. Pelatih dan tempat mereka berlatih berada begitu dekat dengan mereka sehingga menjadi bukti utama kebenaran pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru saja mereka terima.
3. Meningkatkan produksi dari unit produksi P2MKP bersangkutan karena para purnawidya (luaran pelatihan) ada yang langsung ikut berproduksi bersama P2MKP yang melatihnya. Beberapa P2MKP produknya sudah diminta konsumen dalam jumlah banyak baik di kios-kios ataupun swalayan dan supermarket. Dengan adanya purnawidya yang mau langsung ikut berproduksi akan membantu meningkatkan

produksi. Di sisi lain para purnawidya tersebut bias langsung berpendapatan karena produk yang dibuatnya sudah memiliki pasar yang jelas.

4. P2MKP menjadi tempat berkonsultasi (konsultan bisnis) yang dekat bagi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang dikelola P2MKP bersangkutan.
5. Pengelola P2MKP menjadi familiar dengan kegiatan pelatihan sehingga sangat membantu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dalam setahun sebuah P2MKP bisa melatih lebih dari delapan angkatan. Sehingga pengulangan proses sesungguhnya membuat pengelola P2MKP menjadi familiar dengan kegiatan itu dan mampu membenahi kekurangan yang ada secara bertahap.
6. Terjadinya sirkulasi pengetahuan (sharing) tentang usaha perikanan antar P2MKP melalui mediasi BPPP yang membinanya atau mediasi Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan (Puslat KP). BPPP bisa memediasi pertukaran informasi melalui para supervisornya atau melalui pertukaran pelatih. Puslat memediasi sharing pengetahuan dan keterampilan bisa melalui pameran pelatihan.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat baik pengelola P2MKP maupun para lulusan pelatihan. Kegiatan pelatihan di P2MKP berefek pada munculnya unit usaha baru pada masyarakat dan berkembangnya unit usaha yang sudah ada, sirkulasi pengetahuan juga melahirkan inovasi dan modifikasi baru yang semuanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Menyempurna melalui proses, seperti itulah yang dialami oleh unit usaha yang di SK-kan menjadi P2MKP. Kelengkapan fasilitas pelatihan, kecakapan administrasi pelatihan dan kecakapan melatih bagi para pelatih di P2MKP tentu saja tidak langsung sempurna. Tetapi hal itu dibenahi dari waktu ke waktu melalui kegiatan pelatihan yang terus dilakukan pada P2MKP. Dan hal ini menjadi tanggungjawab BPPP yang menjadi peminanya. (Agussalim, 2013)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program P2MKP bisa menjadi peretas jalan untuk keluar dari kemiskinan yang dialami nelayan. Karena pada program P2MKP nelayan diberdayakan secara kognitif dan ekonomi dengan pendampingan dari Balai Diklat Perikanan. Program ini tidak hanya memberdayakan pengelola P2MKP tetapi juga masyarakat yang menjadi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh P2MKP sehingga bisa memiliki usaha seperti usaha P2MKP yang melatihnya.

## 2. Pengelolaan Wisata Bahari dengan Model Ekowisata

Objek wisata pada umumnya masih dikelola secara konvensional dan keuntungan ekonomis hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu sementara masyarakat tidak mendapatkan apa-apa selain kebanggaan bahwa daerah mereka terkenal dan didatangi banyak wisatawan. Tetapi keuntungan secara ekonomis tidak terlalu mereka rasakan atau bahkan tidak sama sekali. Dewasa ini muncul konsep pengelolaan wisata berbasis ekologis yang dikenal dengan ekowisata.

Ekowisata bahari atau pengelolaan wisata bahari berbasis ekologi didalamnya menganut prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ekowisata, maka masyarakat lokal di sekitar objek wisata diberdayakan dengan melibatkan mereka secara total, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan masyarakat setempat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan keberadaan objek wisata bahari tersebut. Pelibatan mereka contohnya melalui penjualan souvenir, menjadikan mereka *tour guide*, guide selam, driver kayak (perahu khas wisata Wayag Raja Ampat). Intinya, masyarakat dilibatkan dengan berbagai layanan jasa yang dibutuhkan oleh pengunjung dan disiapkan oleh masyarakat lokal. (Agussalim, 2012)

Bentuk pemberdayaan lainnya pada pengelolaan ekowisata bahari adalah dengan menumbuhkan usaha skala rumah tangga misalnya dengan usaha membuat produk olahan ikan dalam berbagai diversifikasi yang dijadikan buah tangan (ole-ole) buat para pengunjung. Selain itu masyarakat juga bisa diberdayakan dengan memfasilitasi mereka agar mampu menyediakan *home stay* yang mereka kelola sendiri untuk para pengunjung. Serta masih banyak jenis usaha yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat di lokasi wisata bahari. Masyarakat diberikan pendampingan secara kognitif, keterampilan, permodalan sampai pada monitoring dan evaluasi. Intinya adalah pengelolaan objek wisata bahari dengan konsep ekowisata, bukan penguasaan oleh pengusaha tertentu yang tidak melibatkan masyarakat, tetapi pengelolaan oleh masyarakat lokal untuk kesejahteraan mereka dan untuk kelestarian sumberdaya yang ada pada objek wisata tersebut.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ekowisata akan meretas kemiskinan nelayan karena didalamnya terdapat pengembangan ekonomi kreatif masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat akan mendapat keuntungan yang sangat besar dengan keberadaan objek wisata bahari yang

dikelola dengan konsep ekowisata. Selayaknya konsep pengelolaan ekowisata diterapkan pada semua objek wisata bahari.

#### **D. Kesimpulan**

Kemiskinan pada nelayan tidak berdiri sendiri. Kemiskinan nelayan adalah kemiskinan kultural dan juga kemiskinan struktural. Mereka miskin karena mereka memang miskin secara budaya (sumberdaya, mindset, mental dan semua aspek internal mereka) dan mereka miskin karena faktor eksternal (kebijakan, intervensi pasar dan semua aspek di luar kendali nelayan). Kunci untuk membuka rantai kemiskinan nelayan tersebut salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat nelayan.

Pemberdayaan dalam berbagai bentuk telah dilakukan untuk memberdayakan nelayan. Bentuk pemberdayaan itu di antaranya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melalui program pembentukan P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan) yang dibentuk dari masyarakat nelayan atau yang memiliki usaha berbasis kelautan dan perikanan. Pemberdayaan masyarakat nelayan juga dilakukan dengan penerapan konsep pengelolaan ekowisata pada objek wisata bahari.

program P2MKP bisa menjadi peretas jalan untuk keluar dari kemiskinan yang dialami nelayan. Karena pada program P2MKP nelayan diberdayakan secara kognitif dan ekonomi dengan pendampingan dari Balai Diklat Perikanan. Program ini tidak hanya memberdayakan pengelola P2MKP tetapi juga masyarakat yang menjadi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh P2MKP sehingga bisa memiliki usaha seperti usaha P2MKP yang melatihnya.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ekowisata bahari juga akan meretas kemiskinan nelayan karena didalamnya terdapat pengembangan ekonomi kreatif masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat akan mendapat keuntungan yang sangat besar dengan keberadaan objek wisata bahari yang dikelola dengan konsep ekowisata.

Ambon, 23 Januari 2014

**Agussalim, S.Pi** (*Widyaiswara Pertama BPPP Ambon*)

**Referensi :**

**Agussalim. 2012. Ekowisata Bahari Solusi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. [www.bp3ambon-kkp.org](http://www.bp3ambon-kkp.org)**

**Agussalim. 2013. Pelatihan P2MKP Upaya Pemberdayaan Masyarakat. [www.bp3ambon-kkp.org](http://www.bp3ambon-kkp.org)**

**Anonim. 2013. Bahan Kuliah Pengelolaan Ekonomi Regional dan Pedesaan. Program Studi Ilmu Kelautan. Pascasarjana Unpatti, Ambon.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Karya Tulis Ilmiah dengan Judul 'Pemberdayaan, Kemiskinan Nelayan' dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini ditulis sebagai tugas mata kuliah Pengelolaan Ekonomi Regional dan Pedesaan, Program Studi Ilmu Kelautan, Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Ambon Semester III Tahun Ajaran 2013/2014.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu referensi tentang pemberdayaan masyarakat nelayan.

Ambon, Januari 2014

Penulis,

**Agussalim, S.Pi**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PEMBERDAYAAN, MERETAS KEMISKINAN NELAYAN .....	1
A.    Dasar Pemikiran .....	1
B.    Kondisi Ekonomi Masyarakat Nelayan .....	2
C.    Bentuk Pemberdayaan untuk Meretas Kemiskinan Nelayan .....	4
1. Pemberdayaan Nelayan Melalui P2MKP .....	5
2. Pengelolaan Wisata Bahari dengan Model Ekowisata .....	8
D.    Kesimpulan .....	9
Referensi .....	10